

BAB II

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2017  
DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

1.1        Gambaran Umum Kondisi Daerah

1.1.1    Aspek Geografi

1.1.1.1   Karakteristik Lokasi dan Wilayah

Kabupaten Boyolali dengan bentang Barat-Timur sejauh 48 km dan bentang Utara-Selatan sejauh 54 km, mempunyai luas wilayah kurang lebih 101.510,20 hektar. Kabupaten Boyolali secara administratif terbagi dalam 19 (sembilan belas) kecamatan terdiri 261 desa dan 6 kelurahan dan terletak pada posisi geografis antara 110<sup>0</sup>22'-110<sup>0</sup>50' Bujur Timur dan antara 7<sup>0</sup>7' - 7<sup>0</sup>36' Lintang Selatan. Posisi geografis wilayah Kabupaten Boyolali merupakan kekuatan yang dapat dijadikan sebagai modal pembangunan daerah karena berada pada segitiga wilayah Yogyakarta-Solo-Semarang (Joglosemar) yang merupakan tiga kota utama di wilayah Jawa Tengah-Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan dikembangkannya wisata Solo-Selo (Kabupaten Boyolali)-Borobudur (Kabupaten Magelang) atau SSB, diharapkan lebih meningkatkan pengembangan pariwisata di Kabupaten Boyolali. Di samping itu, seiring dengan mulai perencanaan pembangunan jalan tol Solo-Semarang dan jalan tol Solo-Kertosono yang melintasi wilayah Kabupaten Boyolali, maka diharapkan potensi pengembangan Kabupaten Boyolali, terutama dalam sektor perekonomian dan industri, menjadi sangat besar.

1.1.1.2   Penggunaan Lahan

Wilayah Kabupaten Boyolali seluas 101.510,20 ha, sebagian besar (70%) merupakan lahan kering baik berupa tegalan, pekarangan, maupun hutan dan sisanya berupa sawah, waduk/kolam, dan lahan lainnya. Wilayah yang memiliki lahan kritis dan lahan kering meliputi Kecamatan Sambi, Simo, Nogosari, Andong, Klego, Karanggede, Wonosegoro, Kemusu, dan Juwangi. Kondisi tersebut kurang menguntungkan pengembangan pertanian

dan upaya pemasaran dalam menarik investor. Sementara itu wilayah Kecamatan Selo, Cepogo, Ampel, dan Musuk beriklim cukup sejuk mendukung untuk pengembangan budidaya peternakan sapi dan hortikultura.

Penggunaan lahan secara lengkap dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel II.1  
 Penggunaan Lahan Pertanian di Boyolali  
 Kabupaten Boyolali Tahun 2012-2016

No	Penggunaan Lahan	2012		2013		2014		2015		2016	
		Luas (Ha)	%	Luas (Ha)	%	Luas (Ha)	%	Luas (Ha)	%	Luas (Ha)	%
1.	Lahan Sawah	22.830	22	22.711	22	22.710	22	23.824	23	22.711	22
	a. Irigasi Teknis	5.146,35	5	5.074,25	5	5.074	5	7.465	7	5.074	5
	b. Irigasi Setengah Teknis	4.850,55	5	4.852,75	5	4.852	5	4.927	5	4.853	5
	c. Irigasi Sederhana	2.668,34	3	2.665,34	3	2.665	3	2.007	2	2.665	3
	d. Tadah Hujan	10.165,57	10	10.118,80	10	10.118	10	9.425	9	10.119	10
2.	Tanah Kering	78.679,36	78	78.800,03	78	78.800	78	77.676	77	78.801	78
	a. Pekarangan / Bangunan	25.329,09	25	25.271,61	25	25.280	25	25.290	25	25.280	25
	b. Tegal/ Kebun	30.480,77	30	30.479,77	30	30.471	30	30.466	30	30.471	30
	c. Padang Gembala	983,33	1	983,33	1	983	1	982,67	1	983	1
	d. Tambak/ Kolam	821,09	1	820,45	1	820	1	819,51	1	820	1
	e. Hutan Negara	14.835,49	15	14.835,49	15	14.835	15	14.835	15	14.835	15
	f. Perkebunan Negara/Swasta	-		-		-				-	-
	g. Lainnya	6.229,37	6	6.409,93	6	6.409	6	5.283	5	6.410	6
	JUMLAH :	101.510	100	101.510	100	101.510	100	101.510	100	101.510	100

Sumber data: Statistik Pertanian Tahun 2016

### 1.1.2 Aspek Demografi

#### 1.1.2.1 Pertumbuhan dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Boyolali

Penduduk Kabupaten Boyolali pada Tahun 2014 berjumlah 967.197 jiwa dengan komposisi laki-laki sebanyak 475.847 jiwa dan perempuan sebanyak 491.350 jiwa, dengan luas wilayah 101.510,20 ha maka kepadatan penduduk sebesar 953 jiwa/Km². Sedangkan pada akhir Tahun 2015 berdasarkan hasil perhitungan sementara jumlah penduduk menjadi 971.245 jiwa dengan komposisi laki-laki sebanyak 478.264 jiwa dan perempuan sebanyak 492.981 jiwa, serta

kepadatan penduduk sebesar 957 jiwa/Km<sup>2</sup>. Data tersebut memberikan gambaran bahwa jumlah penduduk Kabupaten Boyolali selama 5 tahun terjadi penambahan 17.408 jiwa atau terjadi pertumbuhan rata-rata per tahun 0,36%.

Data perkembangan penduduk Kabupaten Boyolali sejak akhir Tahun 2011 sampai dengan akhir Tahun 2015, sebagaimana tabel berikut:

Tabel II.2  
Data Kependudukan  
Kabupaten Boyolali Tahun 2011 s/d 2015

No	Tahun	Jenis Kelamin		Jumlah	Peru-bahan	Pertum-buhan (%)	Kepadatan penduduk (Jiwa/Km <sup>2</sup> )
		Laki-Laki	Perem-puan				
1.	2011	469.649	487.201	956.850	3.011	0,31	943
2.	2012	471.593	488.139	959.732	2.882	0,3	945
3.	2013	473.988	489.851	963.839	4.107	0,43	949
4.	2014	475.847	491.350	967.197	3.358	0,35	953
5.	2015	478.264	492.981	971.245	4.048	0,42	957

Sumber data: BPS Kabupaten Boyolali

Penjelasan tabel di atas, bahwa rata-rata tingkat pertumbuhan penduduk di Kabupaten Boyolali dari Tahun 2011 sampai Tahun 2014 mengalami kenaikan sebesar 0,35%, dan Tahun 2015 tingkat pertumbuhan penduduk sebesar 0,42%. Sejalan dengan perkembangan jumlah penduduk maka tingkat kepadatan penduduk yang semakin tinggi sehingga perlu menjadi perhatian utama dalam penyediaan lahan pemukiman dan pertanian.

Untuk mengetahui data perkembangan penduduk Kabupaten Boyolali per Kecamatan pada akhir Tahun 2015, bisa dilihat sebagaimana tabel berikut:

Tabel II.3

Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan  
Kabupaten Boyolali Tahun 2014 dan 2015

No	Kecamatan	Penduduk	
		2014	2015
1.	Selo	27.245	27.255
2.	Ampel	70.090	70.772
3.	Cepogo	54.222	54.408
4.	Musuk	61.314	61.303
5.	Boyolali	61.038	61.500
6.	Mojosongo	52.301	52.514
7.	Teras	47.152	47.520
8.	Sawit	33.027	32.975
9.	Banyudono	45.173	45.332
10.	Sambi	48.959	49.111
11.	Ngemplak	73.543	74.203
12.	Nogosari	62.157	62.501
13.	Simo	43.687	43.751
14.	Karangdede	40.990	41.034
15.	Klego	46.399	46.535
16.	Andong	62.085	62.153
17.	Kemusu	46.632	46.682
18.	Wonosegoro	55.391	55.464
19.	Juwangi	35.810	36.232
	JUMLAH	<b>967.197</b>	<b>971.245</b>

*Sumber data: BPS Kabupaten Boyolali*

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa Tahun 2014 tingkat jumlah penduduk paling tinggi yaitu Kecamatan Ngemplak dengan jumlah penduduk 74.203 jiwa kemudian Kecamatan Selo tingkat jumlah penduduk paling rendah dengan jumlah 27.255 jiwa.

#### 19.1.22 Struktur Penduduk

Penduduk Kabupaten Boyolali sejak Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2015 menurut kelompok umur dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel Bab II.4  
Penduduk Menurut Kelompok Umur  
Di Kabupaten Boyolali Tahun 2011-2015

RentangUsia	Tahun				
(Tahun)	2011	2012	2013	2014	2015
0 – 4	79.323	70.192	64.324	64.549	55.939
5 – 9	80.967	77.501	76.472	76.740	75.764
10 – 14	85.224	82.529	82.202	82.490	77.697
15 -19	73.494	79.837	81.454	81.739	81.427
20 – 24	62.206	60.096	63.261	63.483	69.801
25 – 29	72.577	67.708	64.536	64.762	58.978
30 – 34	71.398	70.991	72.101	72.354	68.914
35 – 39	69.715	67.258	66.287	66.519.	68.160
40 – 44	71.323	71.024	71.865	72.117	66.925
45 -49	65.323	65.931	66.777	67.011	68.109
50 -54	57.848	61.416	63.200	63.421	62.847
55 – 59	44.315	47.682	50.067	50.242	55.643
60 – 64	34.386	37.418	39.989	40.129	42.769
> 65	88.751	100.160	101.304	101.659	118.273
JUMLAH	956.850	959.732	963.839	967.197	971.245

Sumber data: BPS Kab.Boyolali.

Penjelasan tabel di atas, bahwa pengelompokkan penduduk berdasarkan kelompok umur sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan dalam penataan jumlah angkatan kerja penduduk yang umurnya adalah usia di atas 15 tahun sampai dengan di bawah 64 tahun atau yang dikenal dengan usia produktif. Pada gilirannya usia produktif tersebut akan berkurang perkembangannya tiap tahun karena sejumlah penduduk melanjutkan sekolah dan sejumlah penduduk terserap pada lapangan kerja, selisihnya dikenal dengan angka pengangguran.

19.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD dan Realisasi RPJMD

19.2.1. Evaluasi Pelaksanaan RKPD

Evaluasi Pelaksanaan RKPD bermaksud untuk mengetahui sejauh mana prediksi Capaian Pelaksanaan RKPD Tahun 2017 Kabupaten

Boyolali sampai dengan Triwulan I. Evaluasi terhadap hasil RKPD Tahun 2017 bertujuan untuk menilai dan memastikan bahwa target rencana program dan kegiatan prioritas daerah dalam RKPD Tahun 2017 dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dapat dicapai dalam upaya mendukung pencapaian sasaran pembangunan provinsi maupun nasional tahun 2017.

Capaian pelaksanaan RKPD Kabupaten Boyolali 2017 s.d. Triwulan I setelah diverifikasi dengan dokumen RKPD Tahun 2017 perlu dilakukan penyesuaian karena berdasarkan dokumen RKPD Tahun 2017 masih menggunakan nomenklatur Satuan Kerja Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2011, sehingga penyesuaian nomenklatur dilakukan pada proses penyusunan KUA PPAS Tahun 2017 sebagai dasar penyusunan APBD 2017 dengan mendasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016. Evaluasi per OPD tersaji pada Tabel II.5 berikut:

Tabel II.5

EVALUASI RKPD TRIWULAN I TAHUN 2017

No	OPD	TOTAL			TOTAL			JUMLAH REALISASI ANGGARAN	% RATA-RATA	
		(dalam PPAS)			(dalam APBD)				REALISASI KINERJA	
		Anggaran	Kegiatan	Program	Anggaran	Kegiatan	Program	Rupiah	%	%
1	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH	7,137,557,000	38	10	6,424,372,000	38	10	603,351,837	9.39	19.16
2	BADAN KEUANGAN DAERAH	35.982.895.000	63	7	35,524,613,000	62	8	1,041,129,449	2.93	14.47
3	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	2,911,056,000	35	4	2,993,339,000	38	5	0	0	8.36
4	BADAN PERENCANA, LIT DAN BANG	5,787,925,000	52	16	5,294,409,000	46	15	308,359,303	5.82	11.61
5	BAGIAN HUKUM DAN HAM	875,000,000	6	2	875,067,000	6	2	268,580,290	30.69	30.77
6	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	1,892,460,000	6	2	1,770,950,000	6	2	56,489,564	3.19	6.92
7	BAGIAN ORGANISASI	475,000,000	6	3	647,065,000	9	5	144,180,000	22.28	2.22
8	BAGIAN OTONOMI DAERAH	693,490,000	15	8	903,424,000	13	9	252,213,564	27.92	41.92
9	BAGIAN PEMBANGUNAN	341,243,000	3	2	279,028,000	4	2	7,695,000	2.76	14.58
10	BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA	932,072,000	19	5	858,082,000	20	4	94,414,320	11	6.5
11	BAGIAN PEREKONOMIAN	5,885,000,000	6	2	10,857,551,000	7	2	43,176,065	0.4	0
12	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN	381,388,000	9	7	372,520,000	9	7	11,811,380	3.17	25
13	BAGIAN UMUM	2,699,784,000	12	2	2,263,299,000	11	2	92,766,962	4.1	25
14	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	2,033,765,000	30	10	1,822,942,000	29	9	81,000,471	4.44	19.42
15	DINAS KESEHATAN	82,891,435,000	51	17	84,452,349,000	50	17	3,726,179,040	4.63	18.13
16	DINAS KETAHANAN PANGAN	2,892,268,000	35	8	2,121,311,000	30	5	140,378,376	7.64	15.56
17	DINAS KOMINFO	2,866,802,000	26	8	7,015,619,000	28	8	584,197,579	8.33	16.45
18	DINAS KOPERASI DAN TENAGA KERJA	4,225,413,000	56	12	4,236,926,000	51	11	394,391,018	9.31	108.48
19	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	27,908,168,000	41	12	31,904,709,000	41	11	279,698,324	0.88	11.42

20	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	196,943,710,500	39	15	221,706,430,000	38	15	497,877,078	0.25	2.81
21	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	5,971,890,000	34	11	5,408,817,000	35	11	317,333,945	5.8	9.56
22	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	8,485,196,000	46	12	25,133,946,000	46	12	634,013,225	2.52	11.89
23	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)	1,795,854,000	28	7	1,909,354,000	25	7	188,998,466	9.9	19.29
24	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	55,680,653,000	74	11	57,568,733,000	65	11	420,320,719	0.32	23.33
25	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	3,560,876,000	43	13	3,496,624,000	49	16	79,099,250	2.26	38.97
26	DINAS PERDAGANGAN PERINDUSTRIAN	31,076,933,000	35	10	30,041,346,000	37	10	166,357,803	0.5	28.07
27	DINAS PERHUBUNGAN	27,573,320,000	32	10	32,583,064,000	33	11	5,056,969,478	13.33	7.72
28	DINAS PERTANIAN	21,378,569,000	44	7	20,613,211,000	46	9	353,206,709	2.2	10.88
29	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	10,730,763,000	18	4	10,642,019,000	18	4	29,513,688	0.28	21.01
30	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	3,325,802,500	31	7	3,273,803,000	30	7	158,463,784	4.84	25.43
31	DINAS SOSIAL	4,175,193,000	36	9	2,083,597,000	33	9	78,837,201	3.75	12.71
32	DISDUKCAPIL	5,350,927,000	30	5	5,138,612,000	32	5	447,918,671	8.72	16.41
33	INSPEKTORAT	2,276,091,000	31	6	2,111,867,000	32	6	254,952,048	11.03	17.06
34	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	1,669,330,000	34	8	3,950,709,000	34	8	136,416,100	3.45	8.18
35	KEC. AMPEL	620,650,000	34	13	685,650,000	33	12	86,922,996	12.68	12.67
36	KEC. ANDONG	392,435,000	35	13	392,435,000	35	13	47,747,500	12.17	33.58
37	KEC. BANYUDONO	370,270,000	30	13	370,270,000	30	13	29,394,000	7.94	9.17
38	KEC. BOYOLALI	1,526,968,000	34	12	1,526,968,000	33	12	134,863,945	8.83	23.59
39	KEC. CEPOGO	712,003,000	35	12	712,003,000	35	12	61,974,811	8.7	34.56
40	KEC. JUWANGI	472,288,000	30	11	472,288,000	31	11	44,626,144	9.45	18.37
41	KEC. KARANGGEDE	572,573,000	30	11	572,573,000	31	11	9,880,000	1.62	31.36
42	KEC. KEMUSU	473,075,000	31	11	517,075,000	32	11	0	0	24.61
43	KEC. KLEGO	829,200,000	36	11	829,200,000	36	11	53,544,715	6.46	16.5
44	KEC. MOJOSONGO	556,268,000	30	10	556,268,000	30	10	194,015,500	34.88	26.45
45	KEC. MUSUK	867,360,000	37	12	932,360,000	37	12	31,251,053	3.35	11.49
46	KEC. NGEMLAK	584,788,000	35	13	584,788,000	34	13	41,318,547	7.07	13.89
47	KEC. NOGOSARI	894,558,000	40	13	894,558,000	35	13	63,294,514	7.04	16.49
48	KEC. SAMBI	633,210,000	36	12	623,210,000	36	12	175,344,000	27.69	34.31
49	KEC. SAWIT	752,700,000	32	12	752,700,000	32	12	51,522,704	6.85	18.23
50	KEC. SELO	626,376,000	35	12	656,376,000	36	12	104,157,500	15.87	23.61
51	KEC. SIMO	460,950,000	32	9	460,950,000	31	10	21,670,608	4.7	16.92
52	KEC. TERAS	891,270,000	36	12	891,270,000	36	12	79,432,040	8.91	46.55
53	KEC. WONOSEGORO	831,801,000	34	12	890,801,000	35	12	53,213,236	5.97	23.97
54	Kelurahan Banaran	234,000,000	19	7	234,000,000	20	7	30,376,039	12.98	6.25
55	Kelurahan Kemiri	169,050,000	22	6	169,050,000	20	6	23,004,025	13.61	23.75
56	Kelurahan Mojosongo	374,150,000	23	7	374,150,000	24	7	41,377,749	11.06	117.37
57	Kelurahan Pulisen	200,200,000	17	8	200,200,000	20	6	37,240,987	18.6	45.42
58	Kelurahan Sambeng	249,300,000	25	8	249,300,000	18	5	0	0	0
59	Kelurahan Siswodipuran	234,240,000	21	6	234,240,000	21	6	48,140,000	20.55	51.19
60	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PANDAN ARANG	92,420,000,000	3	3	92,443,294,000	3	2	14,740,870,300	14.7	27.78
61	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SIMO	28,510,500,000	3	3	26,030,927,000	3	2	12,178,859,195	46.79	8.33
62	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WARAS WIRIS	26,120,000,000	4	3	18,944,146,000	5	4	820,498,878	4.27	5
63	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	5,333,942,000	31	7	5,203,770,000	26	7	119,948,000	2.31	68.27
64	SEKRETARIAT DAERAH	6,169,981,000	31	4	5,474,284,000	24	4	570,828,148	10.43	32.97
65	SEKRETARIAT DPRD	32,320,232,000	25	5	28,320,232,000	29	6	4,161,134,461	14.69	24.23
<b>TOTAL</b>		774,202,167,000	1,930	56 3	817,479,043,000	1,902	56 1	51,006,742,302	9.05	23.02

Sumber : Data Analisis BP3D 2017.

Jumlah anggaran APBD 2017 sejumlah Rp817.479.043.000,00 ini termasuk anggaran yang ada di 6 kelurahan yaitu sejumlah

Rp1.460.940.000,00. Sebagai catatan, anggaran untuk 6 kelurahan tersebut sudah masuk dalam RKPD Kabupaten Boyolali 2017 dan sudah dianggarkan dalam APBD Kabupaten Boyolali 2017. Perincian untuk alokasi untuk masing-masing tersebut adalah sebagai berikut: Kecamatan Boyolali mencakup Kelurahan Banaran sebesar Rp234.000.000,00, Kelurahan Siswodipuran sebesar Rp234.240.000,00 dan Kelurahan Pulisen sebesar Rp200.200.000,00. Kecamatan Mojosongo terdiri dari Kelurahan Mojosongo sebesar Rp374.150.000,00 dan Kelurahan Kemiri sebesar Rp169.050.000,00. Kecamatan Juwangi terdiri dari Kelurahan Sambeng sebesar Rp249.300.000,00.

Adapun kesesuaian kegiatan pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Boyolali Tahun 2017 dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017 terangkum pada Tabel II.6 berikut:

Tabel II.6  
REKAPITULASI KESESUAIAN KEGIATAN  
ANTARA RKPD DAN APBD TAHUN 2017

NO	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH / UNIT ORGANISASI /UPT	RKPD		APBD
		(+) APBD	(-) APBD	(-) RKPD
	1	2	3	4
1	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH	38	0	0
2	BADAN KEUANGAN DAERAH	59	4	3
3	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	32	3	6
4	BADAN PERENCANA, LIT DAN BANG	44	8	2
5	BAGIAN HUKUM DAN HAM	6	0	0
6	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	6	0	0
7	BAGIAN ORGANISASI	6	0	3
8	BAGIAN OTONOMI DAERAH	7	8	6
9	BAGIAN PEMBANGUNAN	2	1	2
10	BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA	17	2	3
11	BAGIAN PEREKONOMIAN	6	0	1
12	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN	9	0	0
13	BAGIAN UMUM	10	2	1
14	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	29	1	0
15	DINAS KESEHATAN	49	2	1
16	DINAS KETAHANAN PANGAN	29	6	1
17	DINAS KOMINFO	19	7	9



NO	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH / UNIT ORGANISASI /UPT	RKPD		APBD
		(+) APBD	(-) APBD	(-) RKPD
18	DINAS KOPERASI DAN TENAGA KERJA	50	6	1
19	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	39	2	2
20	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	38	1	0
21	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	32	2	3
22	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA	46	0	0
23	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)	23	5	2
24	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	63	11	2
25	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	43	0	6
26	DINAS PERDAGANGAN PERINDUSTRIAN	34	1	3
27	DINAS PERHUBUNGAN	30	2	3
28	DINAS PERTANIAN	42	2	4
29	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	18	0	0
30	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	18	13	12
31	DINAS SOSIAL	31	5	2
32	DISDUKCAPIL	28	2	4
33	INSPEKTORAT	30	1	2
34	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	34	0	0
35	KEC. AMPEL	32	2	1
36	KEC. ANDONG	34	1	1
37	KEC. BANYUDONO	30	0	0
38	KEC. BOYOLALI	33	1	0
39	KEC. CEPOGO	34	1	1
40	KEC. JUWANGI	29	1	2
41	KEC. KARANGGEDE	27	3	4
42	KEC. KEMUSU	27	4	5
43	KEC. KLEGO	32	4	4
44	KEC. MOJOSONGO	28	2	2
45	KEC. MUSUK	30	7	7
46	KEC. NGEMPLAK	33	2	1
47	KEC. NOGOSARI	34	6	1
48	KEC. SAMBI	35	1	1

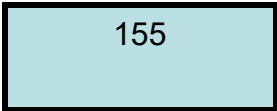
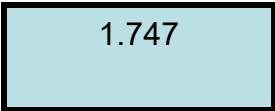
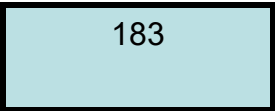
NO	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH / UNIT ORGANISASI /UPT	RKPD		APBD
		(+) APBD	(-) APBD	(-) RKPD
49	KEC. SAWIT	30	2	2
50	KEC. SELO	35	0	1
51	KEC. SIMO	25	7	6
52	KEC. TERAS	36	0	0
53	KEC. WONOSEGORO	34	0	1
54	Kelurahan Banaran	13	6	7
55	Kelurahan Kemiri	20	2	0
56	Kelurahan Mojosongo	21	2	3
57	Kelurahan Pulisen	14	3	6
58	Kelurahan Sambeng	15	10	3
59	Kelurahan Siswodipuran	21	0	0
60	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PANDAN ARANG	2	1	1
61	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SIMO	2	1	1
62	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WARAS WIRIS	4	0	1
63	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	26	5	0
64	SEKRETARIAT DAERAH	20	11	4
65	SEKRETARIAT DPRD	24	1	5
<b>Total</b>		<b>1747</b>	<b>183</b>	<b>155</b>

*Sumber: Olah Data BP3D 2017.*

Dari hasil Evaluasi RKPD sampai dengan Triwulan I Tahun 2017 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kegiatan yang direncanakan di RKPD Tahun 2017 dan kemudian ditindaklanjuti dalam APBD Tahun 2017 sebanyak 1.747 kegiatan.
2. Kegiatan yang direncanakan di RKPD Tahun 2017 namun tidak masuk dalam APBD Tahun 2017 sebanyak 183 kegiatan.
3. Kegiatan APBD Tahun 2017 yang tidak direncanakan dalam RKPD 2017 sebanyak 155 kegiatan.

Dari uraian diatas dapat digambarkan irisan sebagai berikut:



Jumlah kegiatan yang dilaksanakan sebanyak 1.902 kegiatan, dengan tingkat kesesuaian kegiatan =  $(1.747/1.902) \times 100\% = 91,85\%$ .

### 3.2.2 Realisasi Capaian RPJMD

Pemerintah Kabupaten Boyolali dalam RPJMD Tahun 2016-2021 pada tahun pelaksanaan 2017 ini menetapkan 6 program prioritas pembangunan yang diarahkan untuk membangun iklim yang semakin kondusif bagi pertambahan dan perluasan investasi sebagai komitmen Pemerintah Kabupaten Boyolali dalam mengarahkan penggunaan investasi untuk mengembangkan diri sebagai Kabupaten Hijau, Kabupaten Air dan Kabupaten cerdas (*Smart City*). Adapun program prioritas Tahun 2017 adalah yang mendukung:

1. Penyediaan regulasi daerah ramah investasi dan peningkatan skema KPS (Kerjasama Pemerintah-Swasta) untuk peningkatan kapasitas pembangunan daerah untuk mendukung prioritas: (i) Boyolali Kabupaten Air; (ii) Boyolali Kabupaten Hijau; (iii) Boyolali *Smart City*; dan (iv) Program Peningkatan produktivitas dan daya saing masyarakat;
2. Pengaturan struktur organisasi pemerintah beserta infrastruktur pendukungnya sesuai rasionalitas tuntutan kebutuhan untuk mendukung prioritas Program Tata Kelola Pemerintahan yang berintegritas dan pemenuhan kecukupan sarana prasarana pemerintahan menuju penyelenggaraan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel;
3. Pemenuhan kebutuhan infrastruktur *E-governance* untuk mendukung prioritas *Smart City*;

4. Peningkatan kualitas dan pemerataan infrastruktur dasar dan penunjang mendukung prioritas Boyolali Kabupaten Air dan Boyolali Kabupaten Hijau;
5. Peningkatan produksi pertanian, peternakan/perikanan dan pemasaran hasil untuk mendukung prioritas pengembangan daya saing ekonomi, daya tarik wisata, peningkatan kesejahteraan dan penurunan kemiskinan; dan
6. Penguatan ketertiban, keamanan dan kondusivitas wilayah.

Pada Tahun 2017 arah kebijakan yang dikembangkan adalah:

1. Reformasi Tata Kelola Pemerintahan yang ramah investasi dan berbasis teknologi informasi;
2. Peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang pro kesejahteraan rakyat;
3. Peningkatan layanan publik yang responsif dan akuntabel;
4. Peningkatan produksi dan industri berbasis hasil peternakan dan perikanan;
5. Reformasi tata kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi dan kolaboratif; dan
6. Peningkatan partisipasi masyarakat membangun daya saing daerah dan demokratisasi pembangunan berbasis teknologi.

Untuk prediksi capaian RPJMD periode 2016-2021 Secara detail belum dapat disampaikan karena pelaksanaan RPJMD 2016-2021 pada pelaksanaan tahun pertama yaitu tahun 2017 masih dalam proses pelaksanaan, sehingga realisasi capaiannya baru dapat tersaji pada Tahun N+1 atau tahun 2018.

Sedangkan realisasi capaian RPJMD Tahun 2016 belum dapat disajikan karena tahun 2016 merupakan masa transisi yang pada pelaksanaannya sudah tidak menggunakan indikator kinerja berdasarkan RPJMD 2010-2015, tetapi mulai diarahkan pada indikator kinerja dalam RPJMD 2016-2021, namun prediksi pencapaiannya baru dapat dilakukan pada semester 1, hal tersebut dikarenakan penyusunan RPJMD 2016-2021 sampai dengan triwulan 2 masih dalam proses penyelesaian penyusunan, disamping itu proses penyesuaian dengan penyusunan Organisasi Perangkat Daerah

Realisasi capaian RPJMD 2010-2015 pada pelaksanaan RPJMD Tahun 2015 tersaji pada tabel II.7 berikut:

Tabel II. 7  
Realisasi Capaian RPJMD Tahun 2015  
Kabupaten Boyolali

No.	Prioritas	Jumlah Indikator Kinerja	Capaian RPJMD s.d. 2015 (%)
1	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola	50	109,92
2	Pendidikan	48	103,19
3	Kesehatan	81	107,02
4	Penanggulangan Kemiskinan	13	132,25
5	Ketahanan Pangan	94	144,72
6	Infrastruktur	22	102,26
7	Iklim Investasi dan Usaha	32	116,69
8	Lingkungan Hidup dan Bencana	27	101,81
9	Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi	9	106,58
10	Perekonomian	17	73,37
11	Kesejahteraan Rakyat	30	114,59
12	Politik, Hukum dan Keamanan	9	95,96
J u m l a h		432	1.251,00
R a t a – R a t a C a p a i a n			109,03